

BAGIAN TIGA
HIDUP BERSAMA
BEDA PAHAM

PLURALISME, PENGAKUAN KERAGAMAN YANG INKLUSIF

Pluralisme keagamaan (*religious pluralism*) di Indonesia saat ini masih menjadi wacana yang sensitif dan kontroversial. Apalagi sejak Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa sesat pada sekularisme, pluralisme, dan liberalisme dalam Musyawarah Nasional tanggal 26-29 Juli 2005. Di kalangan para pendukung fatwa MUI, tiga paham tersebut dinamakan “Sipilis”.

Sejak fatwa MUI digulirkan, pluralisme telah menjadi tema dalam banyak diskusi, seminar, dan berbagai forum ilmiah. Bahkan para mubaligh juga telah menjadikan pluralisme sebagai tema dalam berbagai kesempatan khotbah. Di samping itu, di beberapa daerah juga terjadi kekerasan sosial yang melibatkan antarpenganut agama dan paham keagamaan. Fenomena ini jelas menunjukkan bahwa pluralisme telah menjadi tantangan bukan saja intern umat beragama, melainkan juga semua pemeluk agama.

Perbedaan perayaan Idul Fitri telah membuka mata kita betapa paham keagamaan dalam Islam terus tumbuh subur di beberapa daerah. Di kala pemerintah dan beberapa organisasi kemasyarakatan (ormas) besar seperti NU dan Muhammadiyah sepakat menetapkan hari raya dalam waktu bersamaan, beberapa paham keagamaan justru menentukan hari yang berbeda. Sebagai contoh, Hibur Tahrir Indonesia (HTI), Jamaah al-Nadzir (Sulawesi), Aliran Aboge (Madiun), serta beberapa tarekat lokal dan jamaah pengajian.

Uniknya, setiap penganut paham keagamaan ini memiliki argumentasi yang beragam. Misalnya, ada yang mendasarkan pada hisab dan rukyat internasional, gejala alam, dan hitungan tahun Jawa. Tentu saja, eksistensi beberapa paham keagamaan ini harus disikapi dengan arif sehingga menghadirkan kultur untuk saling menghormati dan menghargai keragaman pandangan. Pada konteks inilah nilai-nilai pluralisme perlu dikembangkan.

Pluralisme biasanya dibicarakan dalam konteks hubungan antaragama. Dalam perspektif ini, sejarah Islam telah menunjukkan contoh betapa Nabi Muhammad dan para sahabat bersikap sangat toleran pada masyarakat Madinah yang plural. Dalam Piagam Madinah jelas dikemukakan pengakuan dan penghargaan terhadap pluralitas suku dan agama.

Pluralisme juga dikatakan merupakan kelanjutan dari model keberagaman yang bercorak inklusif. Inklusivisme meniscayakan adanya pemahaman bahwa agama lain memiliki kesamaan-kesamaan sehingga ada keinginan untuk mencari titik temu (*kalimah sawa*). Berbeda dari inklusivisme, pluralisme justru mengaku adanya perbedaan-perbedaan. Pluralisme memandang bahwa setiap agama memiliki realitas yang unik. Hal ini berarti pluralisme dibutuhkan dalam rangka membangun kehidupan keberagaman yang koeksisten dan toleran di tengah perbedaan dan keragaman agama dan paham keagamaan.

Merujuk pada konsep Diana L. Eck (1993), pluralisme dikatakan berbeda dengan pluralitas atau diversitas. Pluralisme juga bukan sekedar toleransi pasif. Bahkan pluralisme tidak mesti dipahami sebagai relativisme, sebagaimana dikemukakan MUI dan para penolak paham ini. Lebih dari itu semua, pluralisme merupakan paham yang mengajarkan agar setiap pemeluk agama mengakui keberadaan agama lain dan paham keagamaan yang berbeda. Pluralisme juga meniscayakan agar setiap orang terlibat aktif dalam memahami perbedaan dan berkomitmen menemukan kesamaan dan perbedaan.

Di samping itu, pluralisme jelas menuntut kesediaan antarpe-meluk agama dan paham keagamaan melakukan dialog, saling berbicara, dan saling mendengar. Dialog yang perlu dikembangkan menurut Mukti Ali (1989) bukan semata dialog teologi, tetapi

juga dialog dalam kehidupan, dialog untuk kegiatan sosial, *sharing* pengalaman keagamaan, dan doa bersama.

Sikap dialogis ini menunjukkan ada kesediaan dan keterbukaan setiap pemeluk agama dan paham keagamaan untuk saling mengkritik dan dikritik. Keterbukaan ini mencerminkan adanya kesadaran mengenai kenisbian pandangan dan penafsiran terhadap teks keagamaan. Melalui pemahaman inilah klaim kebenaran (*truth claim*) dapat diminimalisir. Bahkan pertemuan-pertemuan informal melalui pertunjukan seni, teater, musik, dan olahraga, dapat dijadikan sarana mengembangkan dialog lintas agama dan budaya. Melalui perjumpaan-perjumpaan informal tersebut hubungan individu dan komunitas lintas agama dan budaya dapat mencair.

Para penolak pluralisme biasanya memahami paham ini dalam pengertian yang negatif, pesimis, dan terbatas pada pemahaman yang bersifat filosofis dan teologis. Dalam pemahaman mereka pluralisme didefinisikan sebagai paham yang mengajarkan relativisme kebenaran agama. Menurut mereka pemahaman seperti ini secara akademik telah sesuai dengan pengertian yang ada dalam kamus dan ensiklopedi, khususnya yang berkaitan dengan teologi agama-agama. Mereka juga mendasarkan pemahamannya pada pandangan yang dikemukakan para pengusung pluralisme seperti John Hick, Wilfred Cantwell Smith, Huston Smith, dan Harvey Cox.

Definisi pluralisme sebagai relativisme, memang masih menjadi pandangan umum teolog Muslim. Pemahaman seperti ini tentu tidak dapat disalahkan. Sebab, dalam beberapa literatur filsafat dan teologi, pluralisme memang diartikan dengan relativisme. Pengertian ini juga dikatakan telah sesuai dengan makna akademik sebagaimana yang dikemukakan para penggagas dan pengusung pluralisme.

Para penolak pluralisme bahkan mengaitkan kemunculan sejarah paham ini dalam konteks kultur Barat-Kristen. Akibatnya, pemahaman pluralisme sebagai relativisme pun semakin kuat. Tetapi, yang harus diingat adalah bahwa sesungguhnya pengertian pluralisme telah berkembang pesat. Intinya, pluralisme bukan hanya menjadi wacana teologi. Saat ini pluralisme telah di-

makna dalam konteks sosial, budaya, dan politik.

Pergeseran pemaknaan pluralisme dari wacana keagamaan hingga memasuki ranah sosial, budaya, dan politik ternyata tidak hanya terjadi di kalangan pemikir Barat. Beberapa pemikir Muslim juga memahami pluralisme dalam konteks non-teologi. Sebagai contoh, Fathi Usman (2006), memahami pluralisme sebagai bentuk kelembagaan di mana penerimaan terhadap keragaman masyarakat tertentu atau dunia secara keseluruhan sebagai sebuah keniscayaan. Menurutnya, pluralisme lebih dari sekedar toleransi moral atau koeksistensi pasif.

Sachedina (2002) juga menyatakan bahwa pluralisme merupakan kata yang paling ringkas untuk menyebut suatu tatanan dunia baru di mana perbedaan budaya, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai perlu disadari agar warga negara terpanggil untuk hidup damai dalam keragaman. Beberapa pandangan ini jelas menunjukkan apresiasi yang positif terhadap pluralisme. Bahkan telah muncul kesadaran bahwa pluralisme dapat menjadi tantangan semua umat beragama untuk menciptakan kehidupan yang saling menghargai setiap bentuk perbedaan.

Sementara Diana L. Eck (1993) menegaskan bahwa pluralisme menuntut kesediaan antarpemeluk agama untuk saling berbicara dan mendengar secara dialogis. Sikap dialogis ini menunjukkan ada kesediaan dan keterbukaan setiap pemeluk agama untuk saling mengkritik dan dikritik.

Dalam hal ini perlu ditekankan bahwa pluralisme jelas bukan sesuatu yang bersifat pemberian (*given*), melainkan merupakan capaian (*achievement*) sehingga harus terus diusahakan. Karena itu pemaknaan pluralisme dalam pengertian yang positif harus terus didorong agar terlahir pribadi yang terbuka, toleran, optimistik, dan pluralis. Hal ini tentu sangat relevan dengan tantangan pluralitas agama dan paham keagamaan yang kini tumbuh subur di tanah air.

Dengan memahami pluralisme dalam banyak perspektif berarti seseorang akan turut mendorong penerapan nilai-nilai pluralisme dalam kehidupan keagamaan yang sangat plural. Seseorang tidak harus memahami pluralisme hanya dalam pengertian teologis, sebagaimana dikemukakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sep-

erti diketahui, MUI dalam fatwanya menyatakan bahwa yang dimaksud pluralisme adalah paham yang menyatakan bahwa semua agama sama. Secara substansi fatwa MUI jelas dapat dibenarkan.

Tetapi, yang menjadi persoalan adalah ketika MUI membatasi pengertian pluralisme hanya dalam satu perspektif; relativisme. Padahal perkembangan makna pluralisme menunjukkan pengertian yang berbeda dari relativisme. Karena itu, rasanya akan lebih tepat jika yang dianggap sesat oleh MUI adalah relativisme dan bukan pluralisme.

Mencermati keragaman pandangan terhadap pluralisme kiranya dapat dikemukakan bahwa secara konseptual paham ini dapat dimaknai dalam pengertian yang bersifat positif dan negatif. Dikatakan pluralisme positif jika paham ini dimaknai secara terbuka (*outward-looking, open-minded*), toleran, dan optimistik sehingga mampu menghadirkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya dan agama. Pandangan yang positif terhadap pluralisme ini jelas akan melahirkan pribadi yang inklusif dan pluralis.

Sebaliknya, sebutan pluralisme negatif merujuk pada pemaknaan pluralisme dalam pengertian yang terbatas dan tertutup (*inward-looking, close-minded*) pada relativisme. Akibatnya, tidak ada komitmen dari orang yang berpaham demikian untuk terlibat aktif dalam dialog-dialog kemanusiaan yang seharusnya menjadi keprihatinan semua agama. Jika ada dialog antaragama yang dilakukan maka seringkali dialog ini dikembangkan dalam konteks perdebatan teologis. Kondisi inilah yang turut menyebabkan seseorang menjadi eksklusif dan militan.

MEMBUMIKAN NILAI-NILAI PLURALISME

Salah satu pekerjaan besar yang patut menjadi perhatian kita sebagai bangsa yang multibudaya, etnis, dan agama adalah membumikan nilai-nilai pluralisme. Agenda ini mutlak dilakukan karena masih sering terjadi kasus radikalisme sosial di beberapa daerah. Umumnya radikalisme sosial itu diakibatkan oleh ketidaksiapan setiap individu atau kelompok untuk hidup dalam lingkungan masyarakat yang plural. Padahal pluralitas merupakan suatu keniscayaan.

Dalam perspektif agama, pluralitas bahkan disebut sebagai bagian dari ketetapan Allah (*sunnatullah*). Faktanya, negara kita memiliki tidak kurang dari 17.667 pulau besar dan kecil. Meski menggunakan bahasa nasional yang sama, bahasa Indonesia, tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat 350 kelompok etnis, budaya, dan adat istiadat.

Posisi strategis Indonesia di antara Samudra Indonesia dan Samudra Pasifik yang sejak dulu menjadi lalu lintas perdagangan dunia juga turut membentuk karakteristik negara kita hingga menjadi multiagama dan kepercayaan. Di antara penyebab terjadinya radikalisme sosial, terutama yang bernuansa agama, adalah pemahaman agama yang parsial, konflik pendirian tempat ibadah, dan ketidaksiapan antarumat beragama dan paham keagamaan untuk hidup berdampingan. Pada konteks ini dibutuhkan strategi baru dialog lintas agama dan paham keagamaan. Umumnya kita hanya mengenal dialog lintas agama yang dikemas dalam konteks perdebatan teologi.

Akibatnya pengalaman keagamaan yang diperoleh selalu bercorak oposisi biner; *in group-out group*, golongan kami (*minna*)-

golongan kamu (*minkum*), dan benar-salah. Keinginan untuk saling bertemu, bertegur sapa, dan memahami ajaran setiap agama pasti tidak dapat dicapai melalui dialog dengan pendekatan teologis. Akan lebih baik jika dialog itu dirancang secara informal sehingga antarumat beragama dan paham keagamaan saling bertegur sapa tanpa terbebani perbedaan latar belakang sosial, budaya, agama, dan mazhab.

Strategi ini diharapkan dapat mendekatkan jarak yang selama ini menjadi pemisah antarumat beragama. Cara ini juga terasa efektif untuk mengurangi prasangka negatif yang seringkali muncul di antara umat beragama. Pluralisme kini telah menjadi tantangan semua agama dan paham keagamaan. Di antara tantangan yang dihadapi umat beragama berkaitan dengan pluralisme adalah setiap agama dituntut untuk melahirkan ajaran yang inklusif dan toleran terhadap keragaman. Sementara pada saat yang bersamaan agama mewajibkan pemeluknya untuk meyakini bahwa doktrin yang diajarkan memiliki kebenaran mutlak dan bersifat eksklusif.

Problem ini juga dialami penganut paham keagamaan dalam suatu agama. Dalam menghadapi problem tersebut, mayoritas tradisi keberagamaan mengambil sikap bahwa kebenaran hanya menjadi milik mazhab dan agamanya. Sementara mazhab dan agama lain dianggap salah. Akibatnya, setiap pemeluk agama atau penganut paham keagamaan mengklaim ajarannya paling benar. Klaim kebenaran ini pasti meniadakan keinginan untuk saling memahami tradisi keberagamaan.

Karena itu, perlu ditumbuhkan nilai-nilai pluralisme hingga menjadi gerakan aksi yang melibatkan antarumat beragama dan paham keagamaan. Nilai-nilai pluralisme yang harus dikembangkan adalah sikap keberagamaan yang mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda. Pluralisme juga menuntut setiap orang terlibat aktif untuk mewujudkan tata kehidupan yang toleran dalam masyarakat yang majemuk. Penegasan ini penting karena pluralisme terkadang dipahami secara negatif. Pluralisme disamakan dengan paralelisme dan relativisme.

Pluralisme bahkan disamakan dengan nihilisme dan ateisme. Akibatnya, dalam fatwa yang pernah dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada November 2005, pluralisme bersama

sekularisme dan liberalisme divonis sesat. Diana L Eck dalam *What is Pluralism* (1993) menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan relativisme dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami aneka perbedaan. Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang harus dilakukan secara tulus sehingga menghadirkan komitmen untuk *sharing*, saling mengkritik, dan bersedia untuk dikritik.

Jika pluralisme dipahami secara positif, akan melahirkan pandangan keagamaan yang terbuka (*outward looking, open-minded*), toleran, dan optimistik. Pemahaman keagamaan yang demikian pasti menumbuhkan komitmen yang tulus untuk terlibat aktif dalam kegiatan lintas budaya, etnis, dan agama. Untuk menyikapi gejala radikalisme yang melibatkan pengikut paham keagamaan, yang perlu dikembangkan adalah sikap saling menghargai. Sepanjang paham keagamaan itu masih bersepakat tentang ajaran-ajaran yang fundamental, mereka harus tetap dihormati. Meminjam istilah Mukti Ali (1989), sudah waktunya kita bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*).

Keragaman jika dipahami secara positif justru menjadi ujian bagi setiap penganut agama dan paham keagamaan. Ujiannya adalah seberapa besar kita telah memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan umat. Karena itulah, semua agama atau paham keagamaan dituntut untuk berlomba-lomba menjadi yang terbaik (*fastabiqul khairat*). Allah berfirman; Sekiranya Allah menghendaki, niscaya Kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji Kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebaikan. Hanya kepada Allahlah kembali Kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah Kamu perselisihkan itu (QS. al-Maidah: 48).

Spirit ajaran al-Qur'an dalam menyikapi perbedaan ini perlu dikemukakan karena pluralitas agama dan paham keagamaan merupakan rencana Allah. Pada konteks inilah perintah *fastabiqul khairat* perlu menjadi perhatian dalam kehidupan masyarakat yang plural.

MENGEMBANGKAN PLURALISME POSITIF

Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2011. Salah satu persoalan yang harus menjadi perhatian tatkala memasuki tahun baru adalah gejala radikalisme agama. Radikalisme dalam berbagai bentuknya jelas bertentangan dengan ajaran agama yang memerintahkan untuk menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Dengan menggunakan bahasa yang menyentuh hati nurani, Allah berfirman bahwa barang siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang itu telah membunuh orang lain atau membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia membunuh seluruh umat manusia. Sebaliknya, barangsiapa yang memelihara kehidupan seseorang, maka seolah-olah ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya (QS. al-Maidah: 32). Ajaran ini penting dijadikan rujukan untuk memelihara kehormatan nilai-nilai kemanusiaan tanpa memedulikan latar belakang etnis, budaya, dan agama.

Fenomena radikalisme agama yang diantaranya diwujudkan dalam bentuk terorisme dan pengusiran penganut paham keagamaan yang berbeda, meniscayakan kita untuk mengembangkan pluralisme dalam pengertian yang lebih positif. Pada konteks ini jelas dibutuhkan strategi baru dalam dialog lintas agama dan paham keagamaan.

Umumnya kita mengenal dialog lintas agama yang dikemas dalam konteks perdebatan teologi. Akibatnya pengalaman keagamaan yang diperoleh selalu bercorak oposisi biner; *inside-outside*, kami-kamu, dan benar-salah. Keinginan untuk saling bertemu, bertegur sapa, dan memahami ajaran setiap agama jelas tidak akan dicapai melalui dialog yang menggunakan pendekatan teologis.

Menjadi lebih baik jika dialog itu dirancang untuk saling bertegur sapa dan mengucapkan selamat. Misalnya, saat umat Kristiani sedang

merayakan natal. Meski ada pandangan yang melarang untuk mengucapkan selamat natal, namun sejauh ucapan itu tidak memengaruhi keyakinan seseorang maka sesungguhnya tidak ada yang perlu dipersoalkan. Dengan kata lain, ucapan itu harus dipahami sebatas penghormatan pada umat Kristiani yang sedang merayakan natal.

Strategi lain yang patut dicoba adalah saling mengunjungi tempat ibadah. Pengalaman keagamaan yang diperoleh saat mengunjungi tempat ibadah pasti akan memberikan kesan yang mendalam. Strategi ini diharapkan dapat mendekatkan jarak yang selama ini menjadi pemisah antar umat agama. Cara ini juga sangat efektif untuk mengurangi persepsi dan prasangka negatif yang seringkali muncul diantara umat beragama. Jika terus ditradisikan maka budaya saling mengunjungi tempat ibadah dapat menumbuhkan spirit bagi setiap umat beragama untuk mewujudkan pluralisme yang lebih positif.

Karena itulah perlu ditumbuhkan nilai-nilai pluralisme hingga menjadi gerakan aksi yang melibatkan antar umat beragama dan paham keagamaan. Kuntowijoyo (2001) membagi corak pluralisme menjadi dua; pluralisme positif dan pluralisme negatif. Pluralisme positif adalah sikap keberagaman yang mengedepankan penghormatan dan penghargaan pada pendapat, pilihan hidup, serta keyakinan yang berbeda dari dirinya. Tegasnya, pluralisme adalah paham yang sangat menghargai keberagaman.

Sementara pluralisme negatif dipahami sebagai pandangan yang menyatakan bahwa semua agama adalah sama dan benar. Pandangan ini dianut kelompok yang menamakan diri paralelisme. Pluralisme negatif juga mengakui adanya relativisme kebenaran agama. Pandangan ini mengakibatkan orang tidak perlu memegang teguh ajaran agamanya. Bahkan orang dapat dengan mudah berpindah agama, kapan pun dikehendaki. Sikap mudah pindah agama ini jelas bukan contoh yang baik dalam beragama.

Pluralisme sejauh ini dipahami sebagian orang dalam perspektif yang negatif. Pluralisme disamakan dengan paralelisme dan relativisme. Bahkan lebih ekstrim, pluralisme juga disamakan dengan nihilisme dan ateisme. Padahal Diana L. Eck dalam *What is Pluralism* (1993) menyatakan bahwa pluralisme berbeda dengan diversitas (pluralitas), relativisme, dan toleransi pasif. Pluralisme adalah pencarian yang aktif untuk memahami aneka perbedaan. Pluralisme juga menekankan pentingnya dialog yang harus

dilakukan secara tulus sehingga menghadirkan komitmen untuk *sharing*, saling mengkritik, dan kesediaan untuk dikritik.

Dalam menghadapi tantangan keagamaan era kontemporer jelas dibutuhkan pemeluk agama yang inklusif dan pluralis. Pluralitas budaya, etnis, dan agama, harus disadari telah menjadi ketetapan Tuhan (*sunnatullah*). Ini berarti sudah saatnya energi kita tidak dihabiskan untuk memperdebatkan hal-hal yang memang jelas berbeda. Semua tradisi keberagamaan harus dikembalikan pada Allah. Menjadi tugas dan wewenang Tuhan untuk menyelesaikan semua perbedaan. Kita tidak boleh mengambil alih otoritas Tuhan dengan cara apa pun, termasuk pemberian fatwa. Apalagi jika fatwa keagamaan itu menghukumi kelompok-kelompok yang berbeda dengan vonis sesat.

Sudah waktunya kita harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sebab, keragaman jika dipahami secara positif justru menjadi ujian. Seberapa besar kita telah memberikan kontribusi pada perbaikan kehidupan umat. Untuk itu semua agama atau paham keagamaan dituntut berlomba-lomba menjadi umat yang terbaik.

MENYIKAPI PERBEDAAN PAHAM BERAGAMA

Pluralitas paham keagamaan merupakan suatu keniscayaan. Karena itu sikap terbaik yang harus dikembangkan adalah saling menghormati. Dengan meminjam istilah Bapak Perbandingan Agama, Mukti Ali, kita harus bersepakat dalam perbedaan (*agree in disagreement*). Sebab, perbedaan jika dipahami secara positif justru menjadi ujian. Pada konteks inilah kita akan menyaksikan kelompok mana yang paling banyak memberikan kontribusi bagi terwujudnya nilai-nilai kemanusiaan.

Dalam al-Qur'an dikatakan bahwa setiap pengikut paham keagamaan harus berlomba-lomba untuk berbuat yang terbaik (QS. al-Maidah: 48). Kalam Ilahi ini penting direnungkan sebagai kerangka etik ajaran ukhuwah. Perbincangan mengenai ukhuwah sebagai pilar penting menyikapi perbedaan harus terus disemai dalam masyarakat plural. Sebab, konflik sosial terutama yang berlatar belakang perbedaan paham keagamaan masih sering terjadi.

Yang mutakhir adalah insiden berdarah kelompok Sunni-Syiah di Dusun Nangkernang, Desa Karang Gayam, Kecamatan Omben, Sampang. Apa pun alasannya dan siapa pun pelakunya, kekerasan atas nama agama jelas tidak dapat dibenarkan. Budaya agama NU, seperti diutarakan alm. Gus Dur, juga banyak mengadopsi tradisi Syiah. Ini berarti ada faktor lain yang menjadikan kelompok Sunni (khususnya nahdliyin) dan Syiah terlibat konflik.

Mengingat pentingnya ajaran ukhuwah maka kita harus mempersaudarakan berbagai paham keagamaan. Sejarah Islam yang dihentikan oleh peperangan bersaudara dan sikap saling

mengkafirkan, terutama oleh kaum Khawarij, harus dijadikan pelajaran. Dengan pikiran yang jernih kita harus merumuskan sikap menghadapi perbedaan. Apalagi dalam sebuah hadits Nabi menyatakan bahwa perbedaan di kalangan umatku (yang terpelajar) adalah rahmat. Itu berarti perbedaan akan menjadi rahmat sepanjang dialami oleh orang-orang yang berilmu.

Jalaluddin Rahmad dalam *Islam dan Pluralisme* (2006), menawarkan sikap yang perlu dikedepankan untuk menyikapi perbedaan paham keagamaan. *Pertama*, kita harus bersepakat pada ajaran yang *qath'i* dan siap berbeda dengan yang *dzanni*. Sikap ini perlu dikembangkan karena ajaran Islam dapat dibagi menjadi dua; *qath'i* dan *dzanni*. Ajaran *qath'i* berkaitan dengan aqidah dan muamalah yang telah disepakati. Sementara ajaran *dzanni* berkaitan dengan masalah *furu'* (cabang) dari yang pokok. Dalam ajaran *furu'* inilah perbedaan di kalangan umat sering terjadi.

Dalam perspektif ini perbedaan Sunni-Syiah sejatinya berkaitan dengan persoalan *furu'* (cabang), bukan ajaran pokok. Dua aliran ini berbeda dalam memandang kepemimpinan (*imamah*). Kaum Sunni berpandangan kepemimpinan *al-Khulafa al-Rasyidun*, Bani Umayyah, dan Bani Abbasiyah adalah sah. Sementara Syiah memandang bahwa hanya Ali dan keturunannya yang berhak menjadi pemimpin.

Karena perbedaan Sunni-Syiah lebih banyak dalam ranah politik, maka seharusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Apalagi Ali Abd Raziq, seorang pembaru Mesir, pernah menyatakan bahwa syariat secara eksplisit tidak pernah menyebutkan bentuk khusus dari negara yang harus diikuti umat Islam. Karena itu dalam kaitan dengan bentuk negara diserahkan pada ijtihad manusia. Karena bersifat ijtihadiyah maka setiap paham keagamaan harus siap berbeda dan saling menghargai.

Kedua, menggunakan prinsip *tarjih* dan membudayakan dialog. Para ahli fikih bersepakat untuk menjadikan al-Qur'an sebagai sumber utama dalam menentukan hukum. Tetapi, harus diakui bahwa jumlah ayat al-Qur'an yang langsung menunjuk materi hukum sangat terbatas. Menurut Abd al-Wahhab Khallaf dalam *Ilmu Ushul al-Fiqhi* (1972), ayat-ayat hukum dalam bidang muamalah jumlahnya hanya berkisar 230-250 ayat. Itu berarti hanya sekitar 3-4 persen dari jumlah ayat al-Qur'an.

Dari jumlah ayat hukum itu dibagi lagi menjadi dua; *qath'i al-dalalah* (ayat-ayat yang tegas penunjukannya) dan *dzanni al-dalalah* (ayat-ayat yang penunjukannya tidak tegas). Jika diselidiki, ayat-ayat hukum kategori kedua ternyata lebih banyak dibanding yang pertama. Itu berarti wilayah ijtihad sangat luas sehingga meniscayakan terjadinya perbedaan pendapat antar mujtahid. Jika terjadi perbedaan paham yang bersifat *dzanni* maka kita harus mengujinya dengan dalil *naqli* dan *aqli*. Naqli mengharuskan kita menilai perbedaan paham berdasarkan al-Qur'an dan Hadits. Sedang *aqli* digunakan untuk menilai kekuatan alasan rasionalnya. Di sinilah fungsi dialog yang tulus penting dilakukan untuk memahami perbedaan.

Pengujian dengan menggunakan dalil *naqli* dan *aqli* ini memungkinkan kita dapat menentukan pendapat yang lebih kuat (*rajih*). Proses memilih pendapat yang lebih kuat inilah yang disebut *tarjih*. Yang perlu diingat, betapapun kuat pendapat itu kualifikasinya tetap *dzanni*. Ini karena semua hasil ijtihad bersifat relatif dan temporer. Pemahaman ini penting agar tidak terjadi gejala memutlakkan pendapat sendiri sebagai yang paling benar. Sebab, bermula dari klaim kebenaran (*truth claim*) inilah pertikaian antar pengikut paham keagamaan sering terjadi.

Menarik disimak kisah Imam Syafii yang pernah tidak membaca qunut saat shalat Subuh karena ingin menghormati makam Abu Hanifah yang berada tidak jauh dari tempatnya shalat. Tela dan Imam Syafii ini penting dikemukakan sebagai pelajaran betapa tokoh-tokoh mazhab fikih saling menghormati. Itu berarti sudah saatnya kita membudayakan sikap saling menghargai.

Semua tradisi keberagaman harus dikembalikan pada Allah. Hanya Allah yang memiliki otoritas untuk memutuskan persoalan perbedaan paham keagamaan. Kita tidak boleh mengambil alih otoritas itu dengan cara apapun, termasuk pemberian fatwa. Apalagi jika fatwa itu menvonis kelompok yang berbeda sebagai aliran sesat. Yang tidak pernah diperhitungkan adalah bahwa fatwa sesat tersebut berpotensi dijadikan pembenar melakukan kekerasan pada orang atau kelompok yang berbeda. Karena itulah elit agama dan institusi keagamaan harus berhati-hati dalam memberikan fatwa.

MENUMBUHKAN CIVIC VALUES MELALUI DAKWAH

Konflik berlatar belakang perbedaan paham keagamaan masih menjadi persoalan serius. Peristiwa berdarah di Sampang, Madura (2011 dan 2012), menjadi contoh betapa perbedaan paham keagamaan telah memicu konflik sosial yang massif. Di beberapa daerah juga masih terjadi penyerangan terhadap pengikut Ahmadiyah. Itu berarti konflik bernuansa agama sejatinya bersifat laten dan akan menjadi manifes jika ada faktor pemicunya. Pada konteks inilah pemerintah, tokoh masyarakat, dan elit agama, harus berkomitmen untuk menanamkan ajaran agama yang toleran, moderat, dan saling menghormati. Nilai-nilai ini dalam sudut pandang kehidupan bermasyarakat tentu sangat dibutuhkan, terutama jika dihadapkan pada realitas kemajemukan paham keagamaan.

Upaya menumbuhkan nilai-nilai kebaikan yang menjadi substansi ajaran agama diantaranya dapat dilakukan melalui gerakan dakwah (*tabligh*) dari masjid ke masjid. Menempatkan masjid sebagai media dakwah Islam moderat ini penting karena diakui atau tidak jaringan kelompok Islam radikal secara perlahan juga telah menanamkan pengaruh dengan mengajarkan paham keagamaan yang intoleran, ekstrim, dan tidak memberikan ruang bagi perbedaan. Kondisi ini jelas sangat mengganggu ikhtiar untuk menampilkan ajaran Islam yang mampu memberi rahmat bagi keseluruhan alam (*rahmatan lil 'alamin*).

Dua ormas besar, Muhammadiyah dan NU, sebagai pilar *civil society* sejauh ini telah berupaya untuk mengajarkan Islam moderat. Dengan menampilkan wajah Islam moderat, dakwah

Muhammadiyah dan NU pun diterima mayoritas umat. Bahkan perkembangan Islam Indonesia sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari keberadaan dua ormas tersebut. Karena itu, ketika ada gerakan dari kelompok tertentu yang berusaha menampilkan wajah Islam yang radikal dan intoleran, maka Muhammadiyah dan NU perlu duduk bersama untuk mencari solusi. Dua ormas ini pasti menyadari betapa besar fungsi masjid sebagai media untuk menghegemoni pandangan masyarakat melalui materi dakwah yang disajikan mubaligh.

Dalam sejarah Islam, masjid merupakan pusat aktivitas umat. Masjid oleh Nabi Muhammad dan para sahabat bukan hanya dijadikan pusat peribadatan, tapi juga pusat pendidikan dan penanaman nilai-nilai keislaman, kegiatan ekonomi, dan pelatihan tentara untuk kepentingan ketahanan negara. Hampir sama dengan fungsi awalnya, saat ini masjid juga dijadikan pusat kegiatan umat. Yang berubah hanya fungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi dan pelatihan tentara. Masjid juga menjadi simbol ideologi dan paham keagamaan umat. Karena itu, jika ada kasus perebutan masjid, maka yang diperebutkan sejatinya bukan hanya masjid, tapi ideologi dan paham keagamaan.

Selain sebagai pusat peribadatan, masjid sesungguhnya penting dijadikan sarana menumbuhkan nilai-nilai budaya yang positif dalam kehidupan bermasyarakat (*civic values*). Contoh *civic values* yang sangat penting dikemukakan dalam konteks kekinian adalah nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme. Berkaitan dengan keinginan untuk menanamkan *civic values* ini, para mubaligh dapat didorong untuk mentransformasikan ajaran Islam yang lebih ramah. Melalui materi khutbah, pengajian, dan diskusi di masjid, mubaligh memegang posisi penting untuk menunjukkan bahwa ajaran Islam kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, pluralisme, dan multikulturalisme.

Berkaitan dengan usaha menumbuhkan nilai-nilai demokrasi, maka harus diakui bahwa istilah ini masih menimbulkan pro dan kontra. Masih banyak paham keagamaan yang menyatakan bahwa demokrasi adalah kafir karena dianggap produk Barat. Akibatnya, kelompok ini tidak mau terlibat dalam berbagai proses politik, termasuk pemilu yang dilaksanakan setiap lima tahun. Kelompok yang

berpandangan trans-nasional ini mengatakan bahwa produk politik yang dilaksanakan melalui demokrasi harus ditolak karena dianggap tidak islami. Pikiran ini tentu sangat berbahaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Penolakan terhadap demokrasi juga bertabrakan dengan ajaran musyawarah (*syura*). Apalagi sejarah Islam telah mencontohkan bagaimana nilai-nilai demokrasi dipraktikkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya.

Penanaman nilai-nilai pluralisme dan multikulturalisme juga sangat penting karena realitas masyarakat dari sudut budaya, etnik, dan agama, menunjukkan kemajemukan yang luar biasa. Bahkan dapat dikatakan bahwa pluralitas merupakan keniscayaan dan bagian dari ketentuan Allah (*sunatullah*). Maka, yang dibutuhkan dalam kaitan dengan kondisi masyarakat yang plural adalah sikap hidup toleran dan saling menghormati. Dengan meminjam istilah Mukti Ali, Bapak Perbandingan Agama dan mantan Menteri Agama RI, umat Islam harus bersikap *agree in disagreement* (setuju dalam perbedaan).

Pikiran Mukti Ali tersebut sejalan dengan ajaran Nabi Muhammad yang menyatakan bahwa perbedaan di kalangan umatku (yang terpelajar) adalah rahmat. Ajaran ini menyatakan bahwa perbedaan akan membawa rahmat jika melibatkan orang-orang yang terdidik. Sebaliknya, jika perbedaan pendapat dialami orang-orang yang tidak berilmu, yang terjadi adalah sikap saling menyalahkan dan memunculkan klaim kebenaran (*truth claim*). Akibatnya, paham keagamaan yang tidak sejalan dengan diri dan kelompoknya dianggap salah. Sikap menyalahkan kelompok yang berbeda -apalagi sampai menggunakan istilah kafir, musyrik, jahiliyah, masuk neraka, dan lainnya- tentu tidak dibenarkan karena akan menyulut emosi keagamaan seseorang.

Pada konteks inilah kita menyadari betapa penting posisi elit agama dan mubaligh untuk menumbuhkan *civic values* di kalangan umat. Elit agama dan mubaligh harus menghentikan model dakwah yang menghasut dan menanamkan kebencian. Karena memang prinsip dakwah seharusnya bersifat merangkul, dikemas dengan mudah, dialogis, dan tidak menakut-nakuti. Ini penting agar tercipta kehidupan yang ramah terhadap keragaman.

PEMBAURAN SEBAGAI BAGIAN KETAHANAN BANGSA: BELAJAR DARI PERAYAAN AGUSTUSAN

Salah satu persoalan serius yang dihadapi bangsa Indonesia adalah mengatasi problema pluralitas (kemajemukan) masyarakat. Dalam hal ini, pengertian masyarakat majemuk menurut Furnivall (1949) dicirikan sebagai orang hidup berdampingan secara fisik, tetapi karena perbedaan latar belakang sosial, ekonomi, budaya, etnis, politik, dan agama, mereka hidup dalam keadaan terpisah dan tidak tergabung dalam suatu komunitas atau unit politik. Kategori masyarakat majemuk terutama dapat diamati di perkotaan karena keadaan masyarakatnya sangat heterogen. Sementara masyarakat di pedesaan cenderung bersifat homogen sehingga tidak banyak melahirkan persoalan.

Jika faktor kemajemukan masyarakat kota diklasifikasikan, maka dapat ditemukan dua kategori penting, horisontal dan vertikal. Faktor horisontal dapat berupa etnik dan ras atau asal usul keturunan, bahasa daerah, adat istiadat/perilaku, agama, dan pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Sementara faktor vertikal berupa penghasilan (ekonomi), pendidikan, pemukiman, pekerjaan, dan kedudukan sosial politik.

Faktor kemajemukan horisontal merupakan faktor-faktor yang diterima seseorang sebagai warisan (*ascribed factors*). Sedangkan faktor kemajemukan vertikal lebih banyak diperoleh dari hasil usahanya sendiri (*achievement factors*). Dalam tingkat tertentu kemajemukan jelas merupakan tantangan yang harus dicari solusi. Sebab, jika kemajemukan tidak dikelola dengan baik, pasti akan melahirkan konflik sosial yang berkepanjangan.

Banyak kasus terjadi di tanah air yang menunjukkan adanya relasi konflik sosial yang diakibatkan oleh kemajemukan masyarakat. Yang masih hangat dalam ingatan kita adalah problem hubungan antaragama yang melibatkan komunitas Ahmadiyah, para pendukungnya, dan para penentangannya. Penentangan yang disertai kekerasan sosial yang menimpa pengikut Ahmadiyah menunjukkan betapa masyarakat belum memiliki “habit” untuk hidup secara “koeksisten” dengan komunitas yang berbeda agama dan keyakinan.

Agak ke belakang sedikit, tepatnya pada Mei 1998, kita juga menyaksikan kekerasan sosial yang melibatkan penduduk “pribumi” dan “non-pribumi” dalam posisi yang berhadap-hadapan. Beberapa kasus tersebut merupakan contoh dari ketidaksiapan individu dan komunitas untuk hidup secara damai dalam masyarakat yang majemuk.

Menurut Syafrin Sairin (1992) setidaknya ada tiga sumber konflik sosial yang dapat menimbulkan ketidakserasian sosial; *Pertama*, perebutan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi (*access to economic resources and to means of production*); *Kedua*, perluasan batas-batas kelompok sosial budaya (*social and cultural border line expansions*); *Ketiga*, benturan kepentingan politik, ideologi, dan agama (*conflict of political, ideology, and religious interest*).

Sumber konflik pertama merupakan bentuk konflik yang sering kali terjadi. Pemenang konflik ini biasanya adalah individu atau kelompok yang memiliki keunggulan di bidang sumber daya manusia maupun teknologi. Motto; *Only the fittest will survive*, menjadi hukum yang lumrah berlaku dalam pertarungan memperebutkan sumber daya, alat-alat produksi, dan kesempatan ekonomi.

Sumber konflik kedua biasanya muncul dalam masyarakat majemuk, utamanya dialami masyarakat urban di perkotaan. Adanya perbedaan kultur, bahasa, hukum, dan identitas sosial, dapat menyatu dalam kepentingan politik sehingga memicu konflik. Sebagai contoh, pemakaian bahasa tertentu dalam interaksi sosial di hadapan etnis lain dapat dianggap sebagai ekspansi suatu kelompok pada kelompok lain karena dianggap melanggar tapal batas (*boder line*).

Sumber konflik ketiga merupakan benturan antara struktur

yang mapan terhadap kebudayaan, sistem nilai, ideologi, dan agama yang berkembang. Konflik jenis ini biasanya muncul dalam format; penguasa-rakyat, majikan-buruh, dan *patron-client*. Konflik karena kepentingan politik, ideologi, dan agama ini dalam rentang sejarah Indonesia misalnya muncul dalam bentuk percobaan kudeta G30S/PKI dan DI/TII. Dalam bentuk yang lebih kecil konflik juga muncul dalam wujud demonstrasi Pekerja Kaki Lima (PKL), pemogokan buruh, demonstrasi, dan tawuran antarpelajar.

Ketiga jenis konflik tersebut dapat terjadi secara simultan dan melahirkan benturan keras antarindividu dan komunitas di masyarakat. Akibatnya orang sering kesulitan mengidentifikasi jenis konflik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Konflik di Ambon yang terjadi dalam kurun 1999-2004 merupakan jenis konflik yang sangat sulit diidentifikasi. Demikian juga konflik di Sampit (Kalimantan Tengah) dan konflik di Sambas (Kalimantan Barat). Berbagai faktor tampak terlibat dalam konflik ini seperti agama, ideologi, ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Biasanya untuk jenis konflik yang multifaktor ini sangat sulit diselesaikan.

Makna Agustusan

Perayaan tujuh belasan (Agustusan) yang diperingati setiap tahun sesungguhnya dapat dijadikan media untuk mempertemukan berbagai kelompok masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang sosial. Pada acara tersebut semua warga masyarakat hadir, saling menyapa, mengenal, dan tertawa bahagia. Mereka berbaur tanpa mempedulikan latar belakang sosial, ekonomi, etnis, dan agama. Padahal mereka dalam aktivitas sehari-hari barangkali jarang bertemu dan bahkan ada yang tidak saling mengenal.

Melalui Agustusan mereka seakan dipertemukan dalam kegiatan-kegiatan sosial dan aneka jenis permainan. Mereka merasa bahwa perjumpaan-perjumpaan informal dalam bentuk permainan ternyata dapat melupakan status sosial yang seringkali menjadi jarak yang memisahkan antarwarga. Maka tidak berlebihan jika dikatakan bahwa tradisi Agustusan dapat digunakan sebagai salah satu sarana yang sangat bermanfaat untuk menciptakan pembauran antarwarga (*melting pot*).

Melalui Agustusan ini hubungan antarwarga dapat mencair dan terbebas dari segala bentuk prasangka (*prejudice*). Warga kota dengan berbagai latar belakang sosial dipertemukan dalam suatu jenis permainan yang membuat mereka bergembira dan terlepas dari berbagai kegiatan rutin. Ternyata berbagai acara dalam perayaan Agustusan telah menjadi perjumpaan berbagai budaya yang memungkinkan setiap orang dapat saling mengenal identitas budayanya.

Dengan dasar ini sesungguhnya perayaan Agustusan juga dapat digunakan untuk menghadapi persoalan multikulturalisme yang saat ini juga sedang dialami bangsa Indonesia. Pada konteks ini, multikulturalisme dapat didefinisikan sebagai pengakuan terhadap adanya pluralitas budaya yang menumbuhkan kepedulian untuk mengupayakan agar kelompok-kelompok minoritas terintegrasi dalam masyarakat dan kelompok mayoritas mau mengakomodasi perbedaan kelompok-kelompok minoritas agar kekhasan identitas mereka tetap diakui (W. Kymlika, 1989).

Dengan pengertian tersebut berarti multikulturalisme terumuskan dalam bentuk sejumlah prinsip, kebijakan, dan praksis untuk mengakomodasi keberagaman sebagai bagian yang sah dan tidak terpisahkan dari suatu masyarakat. Jadi, arah multikulturalisme adalah untuk menciptakan, menjamin, dan mendorong ruang publik (*public sphere*) yang memungkinkan beragam komunitas dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan kekhasan masing-masing.

Terdapat beberapa alasan mengapa kesadaran terhadap multikulturalisme perlu ditumbuhkan. Menurut Haryatmoko (2007) paling tidak ada tiga hal yang menjadikan kesadaran multikulturalisme mutlak diperlukan. *Pertama*, adanya penindasan atau penafian atas dasar kepemilikan etnis, agama, atau bentuk minoritas lainnya. Dikotomi antara “kita” (kelompok dominan) dan “mereka” (di luar anggota kelompok dominan) seringkali dilembagakan dalam rangka menjauhkan kelompok minoritas dari kekuasaan. Pelembagaan diskriminasi ini banyak terjadi di wilayah publik seperti pekerjaan, pendidikan, jabatan publik, dan hubungan sosial lainnya. Agar diskriminasi ini memperoleh legitimasi, kelompok minoritas secara budaya atau etnis ditekan dan dianggap tidak berhak sehingga kehilangan harga diri (*self-worth*).

Kedua, istilah minoritas secara sistematis telah digunakan untuk memojokkan ke posisi marginal dengan memberi label “tidak terlalu penting” dalam berhubungan dengan kelompok dominan. Akibatnya, perasaan rendah diri dan tidak berdaya semakin terpatri dalam struktur kesadaran kelompok minoritas. Karena itu, semangat multikulturalisme hendak menjawab kebutuhan dasar kelompok minoritas untuk mengembangkan identitas budaya dan memberikan penghargaan terhadap eksistensinya.

Ketiga, kelompok urban dan migran seringkali menjadi pihak yang dipinggirkan oleh kelompok dominan. Situasi ini semakin terasa sejak Undang-undang tentang Otonomi Daerah dilaksanakan. Apalagi dalam banyak kasus, otonomi daerah seringkali disalahartikan dengan pemihakan terhadap warga asli daerah.

Adanya kesadaran terhadap multikulturalisme dapat menyebabkan setiap orang saling memahami kekhasan yang dimiliki dan meneguhkan identitasnya. Dalam hal ini kekhasan tidak dapat disamakan dengan keunggulan. Cara berpikir ini penting dikedepankan dalam memahami keragaman latar belakang sosial, etnis, dan agama. Dalam memahami kekhasan budaya, termasuk agama, kiranya dapat dipertimbangkan teori Levinas (1971) mengenai “penampakan wajah”. Dikatakannya, penampakan wajah bukan bagian dari aku, bukan pula diukur dari tolok ukurku. Yang lain itu sama sekali berbeda dari aku. Namun demikian, hubungan aku dengan yang lain tidak melahirkan kekerasan. Jadi, kehadiran yang lain justru akan membuahkan kedamaian dan menumbuhkan struktur positif dalam kehidupan.

Melalui teori penampakan wajah akan tergambar yang lain. Penampakan wajah yang lain akan memungkinkan orang saling menyapa serta mengundang simpati, empati, dan kekaguman. Penampakan wajah tidak pernah membiarkan orang lepas dari tanggung jawab. Orang dihadapkan pada penampakan wajah yang mengusik sehingga harus bersikap. Wajah yang menampak dalam gambar mencair dalam afeksi sehingga dinamisannya tidak hanya berhenti pada persepsi, melainkan mengkristal dalam kesadaran seseorang.

Melalui teori Levinas kita dapat memahami bahwa perjumpaan dengan wajah yang lain merupakan bentuk hubungan yang ditan-

dai kepedulian dan *nir*-kepentingan. Hubungan ini menyebabkan seseorang bertanggung jawab terhadap yang lain, tanpa menuntut yang lain melakukan hal yang sama. Ini berarti tidak ada tuntutan timbal balik dan tiada pula dominasi. Fenomena inilah yang dapat diamati dari hampir semua warga kota yang merayakan Agustusan. Semua warga berbaur menjadi satu sehingga tidak tampak adanya budaya yang mendominasi. Meskipun memang harus diakui bahwa sejatinya mereka memiliki perbedaan budaya.

Menyadari begitu penting makna sebuah perjumpaan, terutama perjumpaan-perjumpaan informal untuk mempercepat proses pembauran, maka dengan demikian sarana yang memungkinkan dilakukan perjumpaan informal harus diperbanyak. Perjumpaan informal yang melibatkan antarwarga dan antarkomunitas jelas jauh dari kesan formal. Dalam hal ini perjumpaan informal dapat berupa olahraga bersama, permainan (*game*), teater, kesenian, musik, film, dan lain sebagainya. Melalui berbagai analogi permainan itulah seseorang akan terbebas dari ketakutan terhadap norma sosial, keseriusan hidup, dan hirarki sosial.

Sangat disayangkan jika perjumpaan-perjumpaan informal tersebut hanya terjadi dalam peringatan hari besar nasional, seperti halnya perayaan Agustusan. Padahal di dalam perjumpaan-perjumpaan informal inilah masyarakat dengan berbagai latar belakang sosial budaya dapat saling bertemu dan bertegur sapa. Karena itu, menjadi tugas kita semua untuk menciptakan perjumpaan-perjumpaan informal antarwarga sehingga masyarakat dapat hidup damai, saling menghargai dan menghormati setiap bentuk perbedaan. Jika masyarakat telah memiliki kultur untuk hidup dalam keragaman, maka ketahanan bangsa Indonesia yang sangat majemuk ini pun dapat diwujudkan.

MEMBUBARKAN ORMAS ANARKISTIS

Tuntutan sebagian kelompok masyarakat untuk membubarkan organisasi kemasyarakatan (ormas) anarkistis harus segera direspons pemerintah. Tuntutan itu jelas ditujukan pada ormas yang selama ini sering terlibat aksi kekerasan dalam kasus-kasus bernuansa agama.

Front Pembela Islam (FPI) menduduki peringkat pertama ormas yang dituntut untuk dibubarkan karena dianggap sering terlibat aksi kekerasan. Kasus penolakan delegasi FPI oleh masyarakat Kalimantan Tengah (11/2/12) harus dipahami sebagai wujud dari keinginan membubarkan ormas anarkistis. Beberapa komponen masyarakat di Jakarta juga telah melakukan demo anti-FPI (14/2/12).

Sangat mungkin demo anti-FPI akan terus menggelanding di beberapa daerah. Jika ini terjadi, pemerintah harus segera bertindak. Ini karena FPI dengan jaringan yang dimiliki dan ormas pendukungnya sangat mungkin tidak akan tinggal diam. Keinginan pemerintah untuk membubarkan ormas anarkistis pernah mengemuka seiring dengan meningkatnya gejala radikalisme sosial bernuansa agama.

Salah satu kasus yang sempat menjadi perhatian nasional adalah kekerasan terhadap penganut Ahmadiyah di Pandeglang, Banten. Kekerasan sosial bernuansa agama juga pernah terjadi di Temanggung dan Pasuruan. Kasus mutakhir adalah kekerasan terhadap kelompok Syiah di Sampang yang juga menjadi atensi nasional. Beberapa kasus ini menunjukkan bahwa masyarakat ternyata belum siap dengan perbedaan paham keagamaan.

Masyarakat juga begitu mudah terprovokasi untuk melakukan kekerasan. Ironisnya, aparat keamanan yang seharusnya hadir untuk memberikan rasa aman bagi warga terkesan kurang tegas. Secara yuridis pemerintah sejatinya memiliki sandaran hukum untuk menertibkan ormas anarkistis seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Keormasan. persoalannya, beranikah pemerintah menertibkan atau bahkan membubarkan ormas anarkistis? Jawaban terhadap persoalan ini tentu tidak sederhana karena jika pemerintah salah mengambil langkah, pasti akan dikatakan telah melanggar hak asasi manusia (HAM).

Wajah Islam Indonesia

Diakui atau tidak, wajah Islam di Indonesia telah diwarnai perdebatan dan persaingan antara kelompok Islam fundamental dan Islam moderat. Fenomena tersebut memang bukan sesuatu yang baru. Jika dilihat secara historis, pergumulan kelompok Islam fundamental versus Islam moderat telah terjadi sejak 1970-an. Saat itu kelompok Islam moderat melalui tokoh utamanya, Nurcholish Madjid (Cak Nur) terlibat perdebatan dengan kelompok Islam fundamental.

Kelompok Islam fundamental adalah penentang gagasan Cak Nur tentang sekularisasi, Islam yes partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (*inklusivisme*). Perkembangan Islam fundamental sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari krisis yang hampir merata di dunia Islam.

Krisis tersebut bersifat menyeluruh; sosial-ekonomi, politik, budaya, psikologi, dan spiritual. Situasi krisis multidimensi ini telah menghadirkan semangat baru bagi kelompok Islam fundamental dengan berbagai variannya. Meski bervariasi, jika diamati, dapat dikatakan bahwa umumnya kelompok Islam fundamental selalu menekankan ajaran Islam yang bersifat formal-simbolik.

Salah satu ciri yang menonjol dari kelompok Islam fundamental ditunjukkan melalui cara berpakaian dan tampilan fisik lainnya. Islam fundamental juga menekankan prinsip kesatuan agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*). Fenomena ormas keislaman bercorak radikal juga menunjukkan ada karakteristik *polycentrism* (banyak pusat). Karakter ini dapat diamati dari banyaknya

organisasi keagamaan yang menunjukkan ideologi fundamental seperti FPI, Laskar Jihad, Jama'ah Islamiyyah, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), dan Ikhwanul Muslimin.

Yang menarik, setiap ormas ini secara organisatoris tidak saling berhubungan. Karakter lain yang patut didalami adalah sikap yang militan, gigih, ulet, dan tidak pernah mengenal kata menyerah. Dalam fase tertentu kelompok Islam fundamental ini bahkan membenarkan perjuangan secara fisik (jihad). Dalam perkembangannya, terutama sejak era reformasi, tampak sekali ada upaya dari sebagian kelompok Islam fundamental untuk memperluas wilayah dakwah dengan terjun dalam ranah politik praktis.

Inilah fenomena yang menarik diamati dari kelompok Islam fundamental karena mereka telah berupaya untuk menyinergikan perjuangan melalui jalur kultural dan politik kekuasaan. Karena telah bercampur dengan kepentingan politik kekuasaan inilah, kelompok Islam fundamental berubah menjadi kian radikal dan reaksioner.

Alternatif Solusi

Berkaitan dengan keinginan untuk membubarkan ormas anarkistis, yang terpenting untuk dilakukan adalah jangan sampai pemerintah memberikan kesempatan (*window of opportunity*) bagi munculnya tindakan anarkistis. Keinginan membubarkan ormas anarkistis akan sia-sia jika pemerintah tidak berusaha untuk meminimalisasi faktor-faktor pemicunya (*triggering factors*).

Termasuk dalam kategori faktor pemicu di sini adalah ketidakadilan sosial, ekonomi, dan hukum, tersumbatnya partisipasi politik, tersedianya persenjataan, serta kepentingan elit politik. Selain itu, pemerintah juga harus meminimalkan faktor sosial-budaya yang berpotensi untuk membentuk karakter seseorang/kelompok menjadi fanatik dan militan.

Untuk itu, pemerintah perlu melibatkan sebanyak mungkin kelompok masyarakat guna membina umat sehingga memiliki pemahaman keagamaan yang moderat dan terbuka. Peran ini sejatinya dapat dimainkan ormas seperti Muhammadiyah dan NU yang telah teruji menjalankan tugas sebagai gerakan dakwah amar makruf nahi munkar.

JALAN TENGAH PEMIKIRAN ISLAM

Diakui atau tidak, wajah Islam akhir-akhir ini telah diwarnai perdebatan dan persaingan di antara kelompok Islam fundamentalis dan Islam liberal. Fenomena tersebut hampir merata di semua kota besar di Indonesia. Harus diakui bahwa fenomena tersebut bukanlah sesuatu yang baru dalam tradisi pemikiran keagamaan di Indonesia. Seperti dikatakan Charles Kurzman dalam *Liberal Islam: A Sourcebook* (1998) bahwa pergumulan kelompok Islam fundamentalis versus Islam liberal telah terjadi sejak 1970-an. Pada saat itu, Nurcholish Madjid, salah seorang tokoh sentral pembaharuan pemikiran Islam, telah terlibat perdebatan sengit dengan kelompok Islam fundamentalis.

Tengoklah beberapa gagasan segar Cak Nur tentang sekularisasi, Islam yes, partai Islam no, kebebasan berpikir (*intellectual freedom*), ide tentang kemajuan (*the idea of progress*), dan pentingnya sikap terbuka (inklusivisme), telah menjadi perdebatan di kalangan umat Islam saat itu. Karena kontribusi Cak Nur yang denikian penting dalam pembaharuan pemikiran keislaman, kelompok Islam liberal menjadikannya sebagai Bapak Islam Liberal. Meski Cak Nur tidak pernah menggunakan istilah Islam liberal dalam keseluruhan karyanya, tetapi melihat substansi pemikiran yang dikembangkan tampaknya figur Cak Nur sangat layak dijadikan rujukan kelompok Islam liberal

Seperti kita ketahui, gagasan Cak Nur kemudian banyak dirujuk oleh beberapa kelompok dari kalangan muda Islam liberal. Kelompok yang dimaksud di antaranya adalah Jaringan Islam Liberal (JIL) di NU dan Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) di Muhammadiyah. Bahkan dengan dukungan

media, JIL dan JIMM telah memainkan peran cukup penting dalam dialektika pemikiran Islam kontemporer di Indonesia. Secara kontinyu mereka telah mewacanakan beberapa tema pokok Islam liberal, seperti demokrasi, hubungan agama dan negara, pluralisme, hak-hak perempuan, dan kebebasan berpikir. Jika dicermati tema-tema tersebut sesungguhnya berpijak pada kebebasan berpikir. Melalui kebebasan berpikir inilah corak berpikir rasional sebagaimana tampak dalam ajaran tentang pentingnya ijtihad dapat ditumbuhkembangkan.

Sementara kelompok Islam fundamentalis melalui beberapa tokoh dan jaringan institusinya juga tidak mau kalah. Mereka terus mengampanyekan penolakan terhadap gagasan kelompok Islam liberal. Menurut Dekmejian dalam *Islamic Revival* (1988) dikatakan bahwa meski kelompok Islam fundamentalis memiliki banyak kelompok, tetapi secara umum persoalan yang diwacanakan kelompok ini meliputi: (1) Ajaran yang menekankan Islam sebagai totalitas sistem yang secara universal kompatibel dan dapat dilaksanakan di segala waktu dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Dengan doktrin ini berarti pemisahan agama dan urusan dunia (misalnya saja negara) adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan (*inconceivable*). Bagi kelompok Islam fundamentalis, Islam itu meliputi pengertian agama dan negara (*al-din wa al-dawlah*).

Kedua, anjuran untuk kembali kepada al-Qur'an dan Sunnah. Dengan dasar ini berarti umat Islam harus kembali menengok praktek ajaran Islam periode awal dan memurnikan ajarannya untuk mencapai keselamatan hidup; (3) Ajaran tentang puritanisme dan keadilan sosial (*puritanism and social justic*); (4) Ajaran tentang kedaulatan hanya ada pada Allah dan kekuasaan tunduk pada syari'ah (*Allah's sovereignty and the rule syari'ah*); (5) jihad sebagai sarana perjuangan untuk mencapai tujuan. Kelima doktrin ini dapat ditemukan dalam berbagai kelompok Islam fundamentalis.

Kelompok Islam fundamentalis juga terus berusaha meianamkan pengaruh. Dengan didorong oleh keinginan keluar dari krisis yang menyeluruh (*comprehensiveness*) di segala bidang; sosial-ekonomi, politik, budaya, psikologi, spiritual, dan militer, kelompok ini berusaha bangkit. Krisis multidimensi tersebut telah menghadirkan semangat baru. Seiring dengan meningkatnya

peran kelompok Islam fundamentalis itulah, kelompok Islam liberal kurang dapat memberikan pengaruh. Bahkan kelompok Islam liberal tampak lebih sering menjadi korban ketimbang jadi pemenang. Mereka umumnya menjadi pihak yang tersudutkan. Kenyataan tersebut jelas melahirkan sikap pesimisme pada sebagian kalangan Islam liberal. Maka pada konteks inilah kelompok Islam liberal dapat dikatakan sedang menghadapi kehidupan yang mustahil (*impossible life*).

Selanjutnya, Dekmejian (1988), seorang pakar kajian tentang gerakan Islam (*Islamic movement*) menjelaskan tiga sifat utama Islam fundamentalis, meliputi: merata (*pervasiveness*), memiliki banyak pusat (*polycentrism*), dan gerakannya dilakukan secara terus-menerus (*persistence*). Seperti dapat kita amati, gerakan Islam fundamentalis yang menonjolkan simbol-simbol identitas keislaman merupakan fenomena yang merata di hampir semua komunitas Islam. Bahkan gerakan ini dapat dikatakan bersifat *trans-nasional*, artinya menembus batas-batas wilayah negara. Situasi demikian dapat diamati di negara-negara, tidak peduli apakah peta kekuatan umat Islam di negara tersebut mayoritas atau minoritas.

Sementara karakter *polycentrism* berarti bahwa dalam rangka memperjuangkan ideologinya, kelompok Islam fundamentalis menggunakan banyak pusat, masing-masing bertumpu pada seorang pemimpin kharismatik. Anehnya, meski secara umum yang diperjuangkan relatif sama, tetapi di antara mereka tidak saling berhubungan secara organisatoris. Fenomena ini dapat diamati dari berbagai organisasi yang dapat dikelompokkan dalam Islam fundamentalis, seperti Front Pembela Islam (FPI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Jama'ah Islamiyah (JI), Ikhwanul Muslimin, Laskar Jihad, dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Berkaitan dengan karakter *polycentrism* ini peranan pemimpin lokal menjadi sangat menonjol dalam melakukan rekrutmen dan indoktrinasi terhadap anggota baru untuk mendukung perjuangan mereka.

Sementara karakter *persistence* dari Islam fundamentalis tampak dalam usaha tokoh-tokoh dan para pengikutnya yang tidak pernah mengenal kata lelah. Mereka akan terus memperjuangkan keyakinannya. Bahkan dalam tingkat tertentu perjuangan tersebut dilakukan dengan cara radikal dan reaksioner. Di

sinilah tampak ada kecenderungan militanisme yang luar biasa dari gerakan tersebut. Harus diakui, memang tidak semua kelompok tersebut melakukan protes sosial dengan cara kekerasan. Tetapi, protes dengan melibatkan massa dalam jumlah yang banyak secara terus-menerus setidaknya telah menunjukkan betapa kelompok-kelompok tersebut bersifat sangat reaksioner dalam merespon situasi yang berkembang.

Sesuatu yang barangkali cukup menggelitik dipertanyakan adalah apakah kelompok Islam fundamentalis yang sebagian besar bersifat radikal-reaksioner tersebut akan terus mengambil peran? Jawabannya tentu tidak mudah. Tetapi melihat *trend* yang berkembang akhir-akhir ini besar kemungkinan kelompok ini akan tetap memberikan pengaruh yang cukup signifikan. Apalagi jika melihat kecenderungan Islam fundamentalis yang kini sedang mengalami peningkatan *syahwat* politik.

Jika ini yang terjadi, menjadi benar hipotesis William Liddle, seorang Indonesianis asal Amerika Serikat, yang pernah menyatakan bahwa semakin demokratis sebuah negara, semakin besar kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis. Sebaliknya, semakin otoriter suatu negara, semakin kecil pula kemungkinan munculnya gerakan fundamentalis.

Agar dialektika Islam fundamentalis dan Islam liberal secara diametral tidak senantiasa berhadap-hadapan, kiranya penting dicari jalan tengah yang kira-kira dapat dikatakan sebagai jalan ketiga pemikiran Islam. Langkah ini penting ditempuh sebab pada masing-masing kelompok jelas memiliki kelemahan mendasar. Misalnya, Islam fundamentalis yang kerap kali menampilkan wajah pemikiran yang khas radikal dan reaksioner pada tingkat tertentu jelas kurang kondusif jika dihadapkan pada persoalan-persoalan keislaman era kontemporer.

Sementara kelompok Islam liberal, dengan meminjam istilah Kuntowijoyo (2001) juga masih sering tampak mengalami gejala "sawan kekanak-kanakan." Fenomena kekanak-kanakan biasanya berupa cara berpikir "sok liberal" atau "kekiri-kirian (sok radikal)". Bahkan jika mengamati pemikiran yang diwacanakan seringkali kurang mendalam, parsial, terputus dari khazanah masa lampau, dan bukan sesuatu yang baru sama sekali.

Sebagai upaya untuk merintis jangankan tengah pemikiran Islam tersebut, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menganggap pemikiran kelompok Islam fundamentalis dan Islam liberal sebagai bagian khazanah yang tidak perlu disakralkan. Maka berkaitan dengan hal ini penting dikemukakan pendapat Mohammad Arkoun yang pernah menyatakan agar jangan sampai terjadi pensakralan pemikiran keagamaan (*taqdis al-afkar al-diniyy*). Dengan menempatkan produk pemikiran seseorang sebagai khazanah berarti akan menghilangkan sebagian "beban" sejarah sehingga kita dapat secara lebih kritis memberikan pendapat.

Langkah kedua yang menurut saya penting adalah dengan menampilkan corak pemikiran Islam yang mampu menggabungkan aspek modernitas dan tradisionalitas. Dalam bahasa pesantren terdapat ungkapan bijak; *al-muhafadhah 'ala al-qadim al-shalih wa al-akhdzu bi al-jadid al-ashlah* (menjaga tradisi lama yang masih baik dan mengambil yang baru yang lebih baik). Dengan cara ini berarti modernitas harus juga tetap mengakomodasi aspek tradisionalitas. Sikap ini penting agar pembaruan pemikiran keislaman memiliki kesinambungan sejarah dan tidak tercerabut dari akar tradisi yang ada pada masa lalu. Melalui cara inilah kita dapat keluar dari dua ekstrimitas, fundamentalis dan liberalis.

REVITALISASI IDEOLOGI MUHAMMADIYAH

Tanggal 8 Dzulhijjah 1430 Hijriah Muhammadiyah genap berusia satu abad berdasarkan kalender qamariah. Sebagai gerakan sosial keagamaan, meminjam istilah Nurcholish Madjid (Cak Nur), Muhammadiyah dikatakan sebagai organisasi Islam modern yang terbesar di dunia, lebih besar dari organisasi mana pun di dunia Islam. Dilihat dari kelebagaannya, Muhammadiyah juga sangat mengesankan, lebih dari organisasi Islam di mana pun dan kapan pun. Karena itu, menurut Cak Nur, Muhammadiyah merupakan salah satu cerita sukses di kalangan Islam, tidak saja secara nasional melainkan juga internasional.

Selain menerima pujian dan menjadi harapan, Muhammadiyah juga banyak dikritik. Misalnya, terkaitan keabsahan label sebagai gerakan pembaru (*tajdid*). Masyarakat umumnya menerima begitu saja (*taken for granted*) labelisasi Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*. Hampir tidak ada yang mempersoalkannya karena Muhammadiyah senantiasa mengaitkan gerakan dan pemikirannya pada para pembaru Muslim seperti Jamaluddin al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rasyid Ridla.

Padahal, menurut Azyumardi Azra dan Djohan Efendi, Muhammadiyah dalam bidang pemikiran keagamaan lebih tepat disebut gerakan salafiyah, neo-salafiyah, dan bahkan ortodoks. Hal ini dikarenakan tekanan ideologi gerakan Muhammadiyah adalah menghendaki pemurnian (purifikasi) di bidang aqidah dan ibadah. Cerminan dari usaha purifikasi Muhammadiyah

tampak sangat menonjol dalam kegiatan dakwah untuk memberantas takhayul, bid'ah, dan churafat (anti-TBC).

Pada level praksis Muhammadiyah sesungguhnya layak disebut gerakan pembaru. Melalui teologi al-Ma'un (*al-Ma'unisme*) Muhammadiyah telah membuktikan diri sebagai gerakan yang sangat menekankan pentingnya amal shaleh. Dengan menekuni wilayah praksis sosial keagamaan berarti Muhammadiyah telah melaksanakan prinsip *a faith with action*. Dalam bahasa warga Muhammadiyah prinsip ini dikenal dengan dakwah *bil hal* (menjajak dengan amalan dan tindakan konkrit).

Muhammadiyah juga mempraktikkan ajaran sedikit berbicara banyak bekerja, berdisiplin, bekerja keras, dan tanggung jawab secara organisasi. Khusus mengenai ajaran tanggung jawab pada organisasi ini barang kali dapat disebut sebagai yang orisinal dari Muhammadiyah. Sebab, pada konteks itu bentuk pertanggungjawaban umumnya dilakukan secara individual. Berkat beberapa ajaran tersebut Muhammadiyah mendapat kepercayaan dari umat sehingga mampu melahirkan banyak amal usaha, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya.

Tetapi, justru dengan amal usaha yang semakin banyak Muhammadiyah dihadapkan pada berbagai persoalan. Misalnya, energi nyaris habis hanya untuk kegiatan rutin mengurus amal usaha. Meminjam istilah beberapa intelektual muda, Muhammadiyah tampak seperti gajah gemuk yang semakin lamban dalam merespon tantangan zaman. Akibatnya, kontribusi pemikiran Muhammadiyah di bidang sosial keagamaan terasa sangat kurang.

Pada konteks inilah Muhammadiyah perlu melakukan revitalisasi ideologi agar mampu menampilkan diri sebagai gerakan amal sekaligus gerakan ilmu. Buya Syafii Maarif merupakan salah satu tokoh yang konsisten menyuarakan agar Muhammadiyah mampu menyandingkan gerakan praksisme dan gerakan intelektualisme. Menampilkan diri sebagai gerakan intelektual, di samping gerakan praksis, akan sangat menentukan arah dan perjuangan Muhammadiyah dalam memasuki abad kedua. Intelektualisme dapat menjadi sumber energi yang luar biasa, terutama dalam rangka memberikan pencerahan pada kehidupan

an keberagaman di Indonesia. Sebab, diakui atau tidak wajah Islam Indonesia akhir-akhir ini telah diwarnai persaingan yang sangat tajam kelompok Islam fundamentalis dan liberalis.

Kelompok Islam fundamentalis dengan dalih ingin mengembalikan amalan keagamaan sebagaimana dicontohkan generasi awal Islam telah mengalami distorsi yang luar biasa. Misalnya, simplifikasi identitas keislaman melalui simbol pakaian berjubah, memakai celak, berjenggot, dan bercelana di atas tumit. Meski beberapa identitas ini memiliki rujukan dalam ajaran Islam, namun menyederhanakan Islam dengan hal-hal yang bersifat kategoris seperti itu jelas melenceng dari substansi ajaran Islam.

Sebaliknya, kelompok Islam liberal yang mengusung tema reaktualisasi ajaran juga menimbulkan banyak kontroversi. Misalnya, kelompok Islam liberal dikatakan telah mengotak-atik ajaran yang dianggap mapan oleh umat Islam. Penerjemahan kalimat *thayyibah*; *la ilaha illallah* dengan tiada tuhan selain Tuhan, merupakan salah satu contoh kreasi para pembaru Muslim yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan.

Menghadapi perdebatan dan persaingan dua mazhab pemikiran Islam yang senantiasa memutlakkan kebenaran kelompoknya, Muhammadiyah sesungguhnya dapat menampilkan diri sebagai mediator dengan menjalankan fungsi *management of ideas* di antara berbagai mazhab pemikiran. Yang perlu pada berbagai mazhab pemikiran adalah mengajak untuk bergerak ke posisi tengah. Ajakan ini akan efektif jika ditempuh melalui dialog yang tulus dan tidak saling mengklaim kebenaran. Jika dialog ini dilakukan secara berkelanjutan maka pada saatnya kita akan menyaksikan wajah Islam Indonesia yang sangat moderat dan toleran terhadap berbagai keragaman.

Jika Muhammadiyah berhasil menjadi mediator yang baik bagi berbagai mazhab pemikiran keagamaan maka hal ini akan menjadi kontribusi yang luar biasa bagi perkembangan Islam Indonesia. Untuk kepentingan ini jelas dibutuhkan seperangkat ilmu. Karena itulah penting dilakukan revitalisasi ideologi Muhammadiyah agar mampu menjadi gerakan praksis dan gerakan intelektual.

MENEGUHKAN SEMANGAT MODERNISASI DAN PURIFIKASI

Mulai 1-4 April 2010, Majelis Tarjih dan Tajdid (MTT) Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyelenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) ke-27. Acara Munas dipusatkan di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang. Sebagai agenda resmi organisasi, Munas kali ini layak ditunggu bukan hanya oleh keluarga besar Muhammadiyah, melainkan juga masyarakat luas. Sebab, akhir-akhir ini MTT menjadi perbincangan dikarenakan telah memutuskan beberapa fatwa keagamaan yang kontroversial. Yang paling heboh tentu saja fatwa hukum merokok yang dipublikasikan secara luas oleh media massa sejak 8 Maret 2010. Secara tegas, MTT berpandangan bahwa hukum merokok adalah haram karena termasuk perbuatan yang *khabaits* (buruk).

Fatwa tersebut jelas mengundang perdebatan karena mayoritas umat Islam memahami bahwa hukum merokok adalah makruh. Bahkan keputusan resmi Muhammadiyah sebelumnya juga menyatakan hukum merokok adalah *ibahah* (boleh). Belum reda fatwa hukum merokok, MTT menggulirkan wacana waktu shalat Subuh yang dianggap terlalu pagi. Dengan berseloroh, Prof. Syamsul Anwar, Ketua MTT Pimpinan Pusat Muhammadiyah, menyatakan bahwa jika waktu shalat Subuh diputuskan agak lebih siang maka akan semakin banyak orang yang menuikannya. Dua topik tersebut jelas akan menjadi pusat perbincangan peserta Munas. Di samping itu, beberapa persoalan sosial keagamaan yang aktual seperti penentuan arah kiblat, infotain-

men, perbankan, kesehatan dan kedokteran, juga layak dibicarakan.

Masyarakat pasti akan bertanya, persoalan sosial keagamaan apa lagi yang akan difatwakan oleh MTT. Hal ini karena Muhammadiyah sudah terlanjur dikenal masyarakat sebagai organisasi modernis. Layaknya organisasi modernis maka segala persoalan sosial keagamaan pasti akan diperbincangkan secara interkoneksi, dengan mempertimbangkan banyak aspek kehidupan. Pada konteks inilah Muhammadiyah sangat berkepentingan dengan kiprah MTT untuk mendorong terjadinya dinamika pembaruan pemikiran bidang sosial keagamaan.

Sebagai pembantu pimpinan terasa sekali kiprah MTT kalah bersinar dengan majelis lain, terutama yang membidangi amal usaha. Sehingga tidak salah jika dikatakan bahwa Muhammadiyah memang layak disebut pembaru di bidang amal usaha, tapi tidak untuk pemikiran keagamaan. Bahkan dalam bidang keagamaan Muhammadiyah lebih menampilkan diri sebagai gerakan salafiyah. Ciri utama gerakan salafiyah adalah adanya penekanan pada doktrin kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (*al-ruju' ilal Qur'an wassunnah*).

Tetapi, seperti dikatakan Mitsuo Nakamura (1976), Muhammadiyah adalah organisasi yang berwajah banyak (*dhu wujuh*). Dikatakannya, Muhammadiyah itu tampak eksklusif jika dilihat dari luar meski sesungguhnya sangat terbuka dan toleran. Dalam bidang budaya, Muhammadiyah dikesankan anti kebudayaan, meski sesungguhnya telah banyak memasukkan nilai-nilai Jawa. Muhammadiyah juga tampak sebagai organisasi yang sangat disiplin, meski tidak ada alat pendisiplinan yang efektif selain kesadaran setiap individu.

Kesan Muhammadiyah berwajah banyak ini muncul dikarenakan adanya usaha aktivisnya untuk mensintesakan ajaran modernisme Muhammad Abduh dan konservatisme Rasyid Ridla, yang dapat diamati melalui pragmatisme KH Ahmad Dahlan dan formalisme KH Mas Mansur. Maka, tidak mengherankan jika persoalan modernisasi dan purifikasi selalu berdialektis sepanjang sejarah perkembangan Muhammadiyah. Persoalannya, ada kesan bahwa Muhammadiyah kurang mampu mem-

posisikan modernisme dan puritanisme secara proporsional. Se-jauh ini modernisme Muhammadiyah dalam ranah muamalah duniawiyah telah menunjukkan hasil yang memuaskan melalui gerakan amal usaha. Bahkan dalam urusan pengelolaan amal usaha, Muhammadiyah layak dijadikan teladan organisasi mana pun. Muhammadiyah berhasil menunjukkan prestasi yang luar biasa sebagai gerakan amal melalui kiprahnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial.

Di luar prestasi mengembangkan amal usaha, Muhammadiyah banyak dikritik karena dianggap sangat puritan. Semangat *al-ruju' ilal Qur'an wassunnah* yang diterjemahkan aktivisinya seringkali mengabaikan khazanah intelektual Islam yang demikian banyak. Pertanyaannya terletak pada bagaimana kita kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah (*kayfa narja'*). Tampaknya, dalam kaitan dengan persoalan ini Muhammadiyah masih menghadapi persoalan epistemologis dan metodologis sebagai kerangka untuk kembali kepada al-Qur'an dan al-Sunnah.

Modernisasi dan Purifikasi

Sebagai gerakan pembaruan (*tajdid*) Muhammadiyah tampak membatasi diri pada wilayah muamalah duniawiyah. Sementara untuk urusan akidah dan ibadah, Muhammadiyah melakukan purifikasi (pemurnian). Dalam hal akidah dan ibadah, Muhammadiyah merasa sudah cukup dengan yang disyariatkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Karena itu, Muhammadiyah akan bersikap tegas terhadap segala upaya yang berkaitan dengan modernisasi di bidang akidah dan ibadah.

Jika terjadi *tajdid* di bidang akidah dan ibadah biasanya Muhammadiyah menghukumi bid'ah. Sementara dalam urusan muamalah dan duniawiyah, Muhammadiyah berprinsip; *antum a'lamu biumuridunya* (kamu lebih mengetahui terhadap urusan duniamu). Hal ini berarti sangat terbuka peluang untuk melakukan *tajdid* dalam urusan sosial kemasyarakatan.

Sangat disayangkan usaha Muhammadiyah menyeimbangkan modernisme dan puritanisme belum sepenuhnya berhasil. Ada kesan, puritanisme di Muhammadiyah terlalu menonjol. Kesan ini jelas bukan kesimpulan yang tiba-tiba. Jauh hari, James

L. Peacock (1986) telah menunjukkan bahwa Muhammadiyah memang sangat menonjol sebagai gerakan purifikasi.

Kesan demikian juga dikemukakan *insider* Muhammadiyah seperti Moeslim Abdurrahman. Kritik Moeslim didasarkan pada sikap Muhammadiyah yang dianggap kurang berempati terhadap seni dan budaya lokal. Semestinya, persoalan seni dan budaya lokal termasuk dalam wilayah muamalah duniawiyah. Tetapi, Muhammadiyah justru melakukan purifikasi (*tajrid*) terhadap seni dan budaya lokal. Akibat purifikasi dalam ranah muamalah duniawiyah ini Muhammadiyah terkesan anti seni dan budaya lokal. Bahkan di kalangan aktivis muncul guyanon, bahwa satu-satunya seni yang dimiliki Muhammadiyah adalah seni bela diri tapak suci.

Beberapa kritik tersebut kemudian direspon oleh pimpinan Muhammadiyah yang ditunjukkan melalui keinginan untuk menggunakan strategi baru dalam berdakwah. Strategi baru ini berkeinginan untuk mencoba melihat budaya lokal dari dalam (*from within*). Hasilnya, disepakati untuk mengubah orientasi strategi dakwah dengan menjadikan budaya sebagai media. Maka, di kalangan aktivis Muhammadiyah kemudian mengenal konsep dakwah kultural. Strategi dakwah kultural jelas dimaksudkan agar dakwah Muhammadiyah memiliki jangkauan yang lebih luas. Dengan demikian maka kesan bahwa Muhammadiyah hanya cocok bagi warga perkotaan menjadi terbantahkan.

Tantangan yang kini dihadapi MTT adalah menyeimbangkan modernisasi dan purifikasi (*al-tawazun bayna tajdid wa tajrid*). Ini berarti Muhammadiyah harus terus meneguhkan diri sebagai gerakan pembaruan di bidang sosial kemasyarakatan. Sementara yang berkaitan dengan akidah dan ibadah harus dilakukan purifikasi. Yang penting, jangan sampai terjadi kesalahan dalam meletakkan program modernisasi dan purifikasi.

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM KERUKUNAN UMAT

Pada tanggal 27 Maret 2006, bertempat di Hotel Inna Simpang, pernah diadakan seminar nasional dengan tema yang menarik; *Peran Perempuan dalam Kerukunan Umat Beragama*. Seminar ini dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian (Lemlit) dan Pusat Studi Gender (PSG) IAIN Sunan Ampel bekerja sama dengan Pusat Penelitian dan Pengembangan (Puslitbang) Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama. Seminar ini diikuti oleh mayoritas kaum perempuan lintas agama, aktivis LSM, profesional, dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Selain menghasilkan beberapa rumusan penting mengenai peranan perempuan dalam kerukunan hidup umat beragama, seminar ini menyepakati terbentuknya sebuah forum yang dinamakan dengan Forum Komunikasi Perempuan Lintas Agama (FKPLA). Bagi bola salju (*snowball*), forum ini diharapkan dapat menyebar hingga terbentuk di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur. Forum ini juga diharapkan dapat bersinergi dengan lembaga-lembaga serupa yang sebelumnya telah eksis, seperti Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB). Kegiatan FKUB yang dilaksanakan sejak 1998 telah mendapat *support* dana dari APBD dan kini memiliki jaringan yang kuat hingga ke seluruh daerah kabupaten/kota.

Persoalan kerukunan hidup umat beragama memang telah menjadi perhatian yang utama dari pemerintah provinsi Jawa Timur. Ini dapat dimaklumi, sebab kekerasan sosial seringkali berawal dari adanya pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Kekerasan sosial tersebut dapat melibatkan antarpeme-

luk agama, atau bahkan antaraliran/mazhab dalam satu agama.

Apalagi provinsi Jawa Timur dikenal sebagai daerah dengan tingkat pluralitas yang sangat kompleks. Misalnya saja, jika dilihat secara vertikal pluralitas itu dapat diamati dari perbedaan tingkat pendidikan, ekonomi, pemukiman, pekerjaan, dan tingkat sosial budaya. Sementara secara horizontal pluralitas masyarakat terjadi akibat perbedaan agama, etnis, bahasa daerah, geografi, pakaian, makanan, dan budaya material lainnya. Pluralitas masyarakat Jawa Timur baik secara vertikal maupun horizontal tentu dapat menjadi sumber persoalan yang pada gilirannya dapat mengakibatkan konflik sosial.

Perhatian pemerintah provinsi untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama sebenarnya dapat dipandang sebagai bagian dari program pemerintah pusat. Melalui Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2005 tentang rencana pembangunan jangka menengah nasional tahun 2004-2009, di antaranya menyebutkan pentingnya program peningkatan kerukunan umat beragama. Persoalannya yang berkembang kemudian adalah di manakah relevansi program kerukunan umat beragama dengan kaum perempuan?

Memperbincangkan peran kaum perempuan dalam usaha menciptakan kerukunan umat beragama telah memunculkan banyak persoalan yang menarik. Misalnya saja ditanyakan; mengapa perempuan yang dijadikan subyek dalam membicarakan kerukunan antarumat beragama. Bukankah perempuan selama ini sering ditampilkan dalam posisi yang termarginalkan, tersubordinasi, dan inferior, jika dibandingkan dengan laki-laki. Sudut pandang yang *patriarkhi* seperti ini tentu saja sangat tidak menguntungkan bagi kaum perempuan.

Berbeda dengan pandangan tersebut, konstruk kaum perempuan dalam kaitan dengan usaha membangun relasi antarumat beragama ternyata perlu diberdayakan. Perempuan dengan berbagai kelebihan yang dimiliki diyakini dapat memainkan peranan yang cukup signifikan dalam program peningkatan kerukunan umat beragama. Dengan mengambil peran seperti ini, berarti perempuan akan memainkan peranan di ranah publik (*public sphere*).

Di sini aktivitas perempuan dapat didorong sedikit demi sedikit untuk tidak hanya berkiprah di wilayah domestik (*domestic sphere*) dalam rumah tangga, melainkan dapat mengambil peran di bidang

sosial, politik, pendidikan, hukum, ekonomi, dan sebagainya. Apalagi kaum perempuan telah diberikan anugerah oleh Allah berupa struktur biologis dan psikologis yang berbeda dengan kaum laki-laki. Bermodal dari kelebihan yang dimiliki inilah diharapkan dapat membantu tugas-tugas kaum perempuan. Bahkan dengan kelembutannya, kaum perempuan dapat dikatakan memiliki kekuatan lunak (*soft power*) yang sangat dasyat pengaruhnya.

Prof. Dr. M. Ridwan Lubis, memaparkan argumentasi tentang kelebihan yang dimiliki kaum perempuan jika dijadikan pendorong kerukunan hidup antarumat beragama. *Pertama*, perempuan relatif lebih banyak berada dalam urusan domestik rumah tangga sehingga memiliki waktu dan kesempatan untuk turut serta mewarnai pembentukan karakter keluarga. Di sini seorang ibu akan sangat menentukan perannya dalam membentuk sikap hidup yang demokratis bagi anak-anaknya, termasuk dalam urusan kehidupan beragama.

Kedua, bahwa telah terbukti kaum perempuan memiliki kekuatan yang efektif untuk mempengaruhi kaum laki-laki. Di sini kaum perempuan dapat menjadi pusat perhatian bagi lawan jenisnya. Faktanya, dalam banyak kegiatan periklanan selalu saja kaum perempuan digunakan jasanya sebagai model. *Ketiga*, dalam kenyataannya total populasi kaum perempuan jauh melebihi kaum laki-laki sebagaimana yang ditunjukkan oleh berbagai sensus penduduk.

Keempat, bahwa sedikit sekali kaum perempuan yang berpikir individualistik. Mereka umumnya memiliki sikap hidup yang sangat komunalistik. Perempuan biasanya sangat mudah dikenali melalui keterlibatannya dalam perubahan mode sesuai dengan perkembangan *style* dan *fashion*. Meski tidak saling mengenal, perempuan sesungguhnya telah berkenalan dan saling menyapa melalui *fashion* tersebut. Kaum perempuan juga memiliki tabiat senang berkumpul dan berorganisasi.

Kelima, bahwa sekarang ini telah terjadi perkembangan sikap hidup yang mendorong terwujudnya egalitarianisme dan kesetaraan peran kaum perempuan dan laki-laki. Dalam posisi seperti ini kaum perempuan juga memiliki peranan yang penting untuk ikut serta menentukan perubahan sosial. Beberapa alasan inilah yang barangkali dapat menjelaskan pentingnya melibatkan kaum perempuan dalam program kerukunan hidup umat beragama.

Sebagai subyek dalam kerukunan hidup antar umat beragama, peranan kaum perempuan dapat diberdayakan melalui beberapa kegiatan, misalnya dialog antariman, dialog budaya, resolusi konflik (*conflict resolution*), aksi sosial, dan upaya membangun keluarga berwawasan kerukunan. Barangkali kegiatan dialog antariman hanya akan diikuti oleh kelompok elit dari masing-masing agama. Tetapi, untuk kegiatan dialog budaya dan aksi sosial sesungguhnya dapat dilakukan secara massif. Apalagi jika dalam kegiatan aksi sosial itu dilakukan dalam bentuk pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, bantuan untuk anak yatim dan lansia, pengentasan kemiskinan, dan persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya.

Kegiatan aksi sosial juga dapat berupa pemberian advokasi dan terapi psikologis kepada kaum perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana sering dilakukan kelompok LSM perempuan seperti halnya WWC (*Women Crisis Center*). Tentu program-program seperti ini manfaatnya akan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat luas jika dilakukan kepada kaum perempuan tanpa memandang latar belakang sosial budaya, termasuk di dalamnya agama. Di samping itu, perempuan juga dapat mengambil peranan sebagai bagian dari upaya resolusi konflik sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama yang akhir-akhir ini marak terjadi.

Di sinilah arti penting kehadiran FKPLA. Agar forum yang baru terbentuk ini tidak hanya formalitas belaka, maka perlu segera dirumuskan program kerja yang berkelanjutan (*sustainable*), bukan program yang *sporadis*. Masih banyak persoalan sosial di sekitar kita, terutama yang berkenaan dengan problem kerukunan hidup umat beragama, yang membutuhkan kehadiran sentuhan dan kelembutan hati kaum perempuan.

MEMERANGI IDEOLOGI TERORISME

Setiap gerakan pasti memiliki ideologi yang dijadikan nilai-nilai dasar dalam berjuang. Sebagai manifestasi gerakan sosial keagamaan yang bercorak radikal, terorisme juga memiliki ideologi yang senantiasa diperjuangkan.

Pada konteks inilah perhatian kita harus diarahkan untuk mencermati ideologi yang diperjuangkan terorisme. Ini penting karena terorisme terus menunjukkan perkembangan dengan merekrut banyak kalangan, terutama pemuda. Jaringan terorisme menunjukkan betapa pemuda menjadi sasaran indoktrinasi. Mereka dibidik karena dianggap labil dan sedang mencari jati diri sehingga berpotensi untuk dijadikan kader.

Melalui para pemuda inilah ideologi terorisme terus disemai sehingga gerakan terorisme sulit dilumpuhkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengatakan bahwa aksi terorisme belum berakhir (SINDO, 10/9/12). Aksi terorisme memang tidak akan pernah berakhir sepanjang ideologi gerakannya tidak diperangi. Karena terorisme terus bermetamorfosa, hal yang perlu dilakukan adalah melawan ideologinya.

Ikhtiar ini harus melibatkan seluruh elemen *civil society* dan dilakukan tanpa kenal lelah. Sebagai langkah awal, usaha melawan ideologi terorisme harus dimulai dengan memahami faktor yang menyebabkan kemunculannya. Di samping itu perlu pula dipahami karakter gerakan terorisme. Hal ini jelas bukan pekerjaan mudah karena terorisme telah menjadi fenomena sosial keagamaan yang berakar kuat.

Faktor munculnya terorisme dapat dijelaskan dengan tiga teori. *Pertama*, melalui teori struktural yang mengaitkan terorisme dengan

sebab-sebab yang bersifat eksternal seperti politik, sosial, budaya, dan ekonomi. *Kedua*, melalui teori psikologi yang menjelaskan motivasi seseorang hingga tertarik untuk bergabung dengan organisasi teroris. Bahkan dengan motivasi tinggi mereka menyiapkan diri sebagai “pengantin” untuk melakukan bom bunuh diri. *Ketiga*, melalui teori pilihan rasional yang menjelaskan adanya kalkulasi untung-rugi yang dijadikan pertimbangan pelaku terorisme.

Penjelasan teori struktural mengaitkan latar belakang terorisme dengan dua faktor. *Pertama*, faktor prakondisi, berupa penyebab tidak langsung terorisme. Faktor ini berupa akumulasi kekecewaan kelompok teroris, terutama yang berkaitan dengan kegagalan dalam merealisasikan cita-cita politik Islam. Ini dapat dipahami karena gerakan keagamaan yang bercorak radikal selalu memiliki agenda di bidang politik.

Watak politik gerakan radikal dapat diamati melalui perjuangan tokoh-tokohnya dalam konteks kekuasaan seperti keinginan mendirikan negara Islam, formalisasi syariah, serta memahami agama dan politik sebagai satu kesatuan (*din wa al-dawlah*). Hanya saja, cita-cita politik ini baru sebatas imajinasi karena belum berhasil untuk diwujudkan. Karena itulah Oliver Roy (1994) menyebut cita-cita kelompok Islam politik ini sebagai Islamic political imagination (imajinasi politik Islam).

Kedua, faktor pemercepat (*triggering factor*), yaitu pemicu langsung gerakan terorisme. Termasuk dalam faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial ekonomi, tiadanya penegakan hukum (*law enforcement*), tersumbatnya partisipasi politik sehingga masyarakat mengalami tuna kuasa (*powerless*), dan tersedianya persenjataan. Adapun teori psikologi menjelaskan aspek kejiwaan pelaku teroris, mulai dari rekrutmen, pengenalan, kepribadian, penanaman ideologi, dan motivasi anggotanya.

Melalui penjelasan psikologi dapat diketahui latar belakang sosial pelaku teroris. Misalnya, ditemukan fakta bahwa pelaku terorisme adalah mereka yang mengalami keterasingan sosial. Kemudian teori pilihan rasional menjelaskan bahwa terorisme dilakukan dengan pertimbangan untung-rugi. Melalui teori ini diperoleh penjelasan mengenai faktor *cost and benefit* yang menjadi pertimbangan pelaku.

Misalnya, ditemukan fakta bahwa pelaku bom bunuh diri

adalah mereka yang secara ekonomi kurang mampu. Fakta ini menunjukkan sesungguhnya ada alasan ekonomi di balik keberanian mereka melakukan teror. Ada juga individu yang tergoda masuk jaringan terorisme dengan pertimbangan keagamaan. Mereka berharap mati syahid dan masuk surga. Spirit keagamaan ini terbangun berdasarkan pemahaman yang parsial terhadap ajaran Islam mengenai jihad.

Padahal, jihad tidak hanya berkaitan dengan perjuangan fisik. Buya Sutan Mansur, mantan Ketua (Umum) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahkan memaknai jihad dengan “berkerja sepenuh hati”. Pemaknaan ini menarik karena sama sekali tidak menyinggung kata perang.

Dengan salah satu cirinya yang berupa *persistence*, gerakan radikal bergerak terus-menerus, pantang menyerah, dan berani mengambil risiko apa pun asal tujuan tercapai. Dengan karakter ini maka tokoh terorisme diharuskan merekrut kader yang akan melanjutkan perjuangannya.

Melalui cara ini ideologi terorisme terus ditanamkan sehingga mengakar kuat dalam diri pengikutnya. Berkaitan dengan keinginan berjihad untuk melawan ideologi terorisme, maka yang harus dilakukan adalah tidak memberikan kesempatan terhadap munculnya tindakan radikal. Dan, keinginan ini akan tercapai jika faktor-faktor yang menjadi pemicu terorisme diminimalkan.

Termasuk dalam kategori faktor pemicu adalah ketidakadilan sosial, ekonomi, hukum, politik, dan kepentingan elit. Dalam kaitan ini, penanganan kasus korupsi, terutama yang menjadi perhatian publik, harus segera diselesaikan dengan menjunjung asas keadilan.

Jika ini tidak dilakukan, maka persoalan ketidakadilan dalam penanganan korupsi juga sangat berpotensi untuk memicu aksi teroris. Hal ini penting dijadikan atensi pemerintah dan elite politik agar bahaya laten terorisme dapat dicegah.

MENJAGA SPIRIT INTELEKTUALISME KANG MOESLIM

Muhammadiyah telah kehilangan salah satu kader terbaiknya. Dia adalah Doktor Moeslim Abdurrahman. Tokoh asal Lamongan yang akrab dipanggil Kang Moeslim ini wafat dalam usia 64 tahun pada 6 Juli 2012 karena serangan jantung. Rasanya bukan hanya Muhammadiyah yang kehilangan, karena Moeslim selama ini dikenal sebagai intelektual yang sangat dekat dengan kalangan NU dan tokoh lintas agama.

Kedekatan ini tidak dapat dilepaskan dari buah pikiran Moeslim yang tiada henti menyuarakan pentingnya usaha untuk menumbuhkan nilai-nilai multikulturalisme. Bagi Moeslim, pluralitas budaya, etnis, dan agama, merupakan sebuah keniscayaan. Pluralitas bahkan dipandang sebagai bagian dari rencana Tuhan (*sunmatullah*). Karena itu, tidak ada pilihan lain kecuali harus menyiapkan diri untuk hidup dalam suasana saling menghargai di tengah keragaman.

Di internal Muhammadiyah, Moeslim bersama dengan Buya Syafii Maafif, dikenal sebagai tokoh yang sangat dekat dengan kaum muda yang tergabung dalam Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM). Dalam banyak kesempatan Moeslim bahkan menjadi pembela nomor wahid terhadap berbagai kritik yang dialamatkan pada JIMM. Itu dilakukan karena dalam pandangan Moeslim, kaum muda yang berpikiran progresif dapat dijadikan sumber harapan bagi pembaruan (*tajdid*) pemikiran Muhammadiyah di masa mendatang.

Untuk merealisasikan dukungannya, Moeslim beberapa kali menyelenggarakan workshop pemikiran Islam yang diikuti kaum muda Muhammadiyah. Bahkan Moeslim pun mendirikan

Al-Maun Foundation, tempat berhimpunnya kaum muda Muhammadiyah yang berpikiran progresif. Ikhtiar Moeslim untuk menumbuhkan intelektualisme itu tentu harus terus disemai.

Sejak awal 2000 gairah intelektualisme di kalangan kaum muda Muhammadiyah mulai menggeliat. Itu terjadi seiring dengan munculnya beberapa intelektual muda seperti Abd Rohim Ghozali, Abd Mu'thi, Zuly Qodir, Sukidi, Ahmad Najib Burhani, Zakiyuddin Baidhawiy, Ahmad Fuad Fanani, dan Pradana Boy. Mereka telah menunjukkan eksistensinya sebagai energi baru Muhammadiyah. Mereka telah menulis beberapa buku dan artikel di banyak media. Mereka juga mewacanakan berbagai tema pemikiran keislaman era kontemporer. Bahkan tidak jarang beberapa tulisan mereka juga memberikan kritik konstruktif terhadap gejala konservatisme di Muhammadiyah.

Karena itu tidak mengherankan jika beberapa pemikiran sosial keagamaan mereka telah menjadi perdebatan publik. Tentu saja kemunculan kaum muda ini patut disyukuri karena berarti bahwa spirit *tajdid* yang dikatakan telah mulai redup seperti terlahir kembali. Eksistensi kaum muda yang progresif ini seakan meneguhkan kembali label Muhammadiyah sebagai gerakan *tajdid*.

Tetapi, harus diakui bahwa tidak semua warga Muhammadiyah menunjukkan apresiasi yang positif terhadap kiprah intelektual muda. Wacana kaum muda Muhammadiyah yang progresif dianggap telah dihinggapi virus "sawan kekanak-kanakan", seperti sok liberal, sok radikal, dan kekiri-kirian. Beberapa tema yang diwacanakan seperti Islam liberal, Islam proletar, Islam kiri, Islam borjuis, dan pendidikan yang membebaskan model Paulo Freire, dikritik habis.

Dalam situasi ini, Moeslim hadir dan memberikan pembelaan. Bersama Buya Syafii, Moeslim berpesan agar warga Muhammadiyah tidak cepat marah dan menuduh sesat ketika membaca pikiran kaum muda. Menurut Moeslim, selama mereka masih menjalankan prinsip ajaran agama seperti shalat dan puasa, maka mereka tidak perlu dimusuhi. Pembelaan Moeslim ini menunjukkan keinginannya untuk menjadikan Muhammadiyah sebagai rumah intelektual bagi berbagai mazhab pemikiran (*school of thoughts*).

Moeslim patut bersyukur karena Din Syamsuddin, Ketua Umum

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, juga memberikan dukungan terhadap kiprah kaum muda. Dalam beberapa kesempatan Din mengakui bahwa sering ada pertanyaan mengenai eksistensi komunitas yang berpandangan liberal di Muhammadiyah. Pertanyaan ini pun dijawab dengan menyatakan bahwa mereka sesungguhnya tidak seperti yang dituduhkan banyak orang. Seperti, ada yang bilang mereka sudah tidak lagi beragama. Sebab, kenyataannya mereka masih shalat. Mereka juga masih berpuasa dan bahkan dengan sangat lancar mengutip ayat al-Qur'an dan Hadits Nabi ketika menyampaikan pandangannya. Karena itu menurut Din, kalau mereka masih shalat, puasa, dan meyakini kebenaran al-Qur'an dan Hadits, maka itu jelas bukan liberal.

Pembelaan Moeslim dan beberapa elit Muhammadiyah terhadap kaum muda yang berpandangan progresif jelas menunjukkan keinginan kuat untuk mendorong agar intelektualisme terus tumbuh dan berkembang. Intelektualisme ini penting ditradisikan untuk mengimbangi kecenderungan praksisme di Muhammadiyah. Sebab, jika watak kepraksisan sebuah organisasi tampak menonjol, maka akan berimplikasi pada kurangnya wawasan. Padahal wawasan mutlak diperlukan untuk memberikan kesadaran menyeluruh pada kegiatan amaliah. Wawasan juga diperlukan sebagai sumber energi bagi pengembangan yang dinamis dan kreatif dari keseluruhan kegiatan amaliah.

Pada konteks inilah penting ditekankan usaha untuk menyeimbangkan watak praksisme dan intelektualisme. Apalagi Muhammadiyah kini telah berusia lebih dari satu abad. Muhammadiyah pun diibaratkan sebagai organisasi yang sudah tua dengan beban yang sangat berat sehingga mungkin mengalami kelambanan dalam merespon berbagai persoalan. Di sinilah dibutuhkan sumber energi, yakni intelektualisme, agar kiprah amal sosial Muhammadiyah tetap eksis.

Akhirnya, selamat jalan Kang Moeslim. Semoga virus intelektualisme yang telah ditularkan pada kaum muda dapat menjadi amal shaleh. Bukankah sedekah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shaleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, dikatakan Nabi sebagai amalan yang pahalanya akan terus mengalir. Saya yakin ilmu bermanfaat yang telah diwariskan Kang Moeslim termasuk kategori amal shaleh. *Wallahu a'lam.*